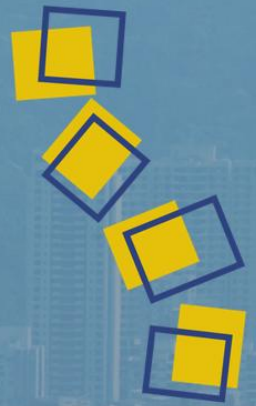




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jln. Gerakan Koperasi
No. 13 Majalengka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Majalengka, 27 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Majalengka



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19711202 199202 1 001

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Bidang Kesatuan Bangsa	
Bidang Poldagri dan Ormas	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Berkurangnya Potensi Konflik Sosial dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dan Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial.

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dapat dihitung melalui jumlah masyarakat yang melaksanakan kegiatan bina kesatuan bangsa. Penurunan Potensi Konflik Sosial diperoleh dari hasil pendeteksian dini pada lingkungan sosial yang rawan terjadi konflik.

Capaian Tingkat Bina Kesatuan Bangsa adalah 103,03% dari target 82,50% dan realisasi 85% dan untuk capaian Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial adalah 123,96% dari target 66% dan realisasi 81,82%.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya, Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan target IKU hanya 82,5% dan 66%.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

03

Daftar Isi

04

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

09

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

14

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

34

BAB IV Penutup

36

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Kedudukan

Berdasarkan perbup 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, brkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

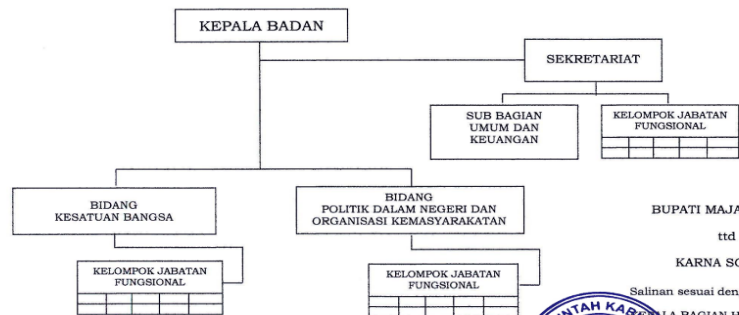
- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 71 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
 ttd
 KARNA SOBABI
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,
 DEDE SUPENA NUURBAHAR
 NIP. 651225 198603 1 003



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 29 orang dengan rincian sebagai berikut:



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, telaah visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2025-2030 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka untuk 3 (Tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Pemahaman Ideologi, nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin pudar; Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin majunya teknologi saat ini membuat masyarakat kurang menerapkan nilai nilai pancasila yang luhur dan melemahnya wawasan kebangsaan masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air semakin kurang, jelas ini adalah isu strategis yang akan menjadi acuan kita dalam meningkatkan lagi pemahaman dan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai Badan yang memiliki tugas dalam hal ini.
2. Pendidikan Politik masyarakat yang masih rendah; Pendidikan politik yang masih rendah dapat di lihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada serta masih maraknya konflik konflik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilukada.
3. Krisis kepercayaan kepada pemerintah; Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan kurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai konflik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan
4. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang mulai memudar
Menurunnya harmonisasi kehidupan masyarakat dikarenakan meningkatnya individualisme masyarakat dengan majunya teknologi dan maraknya konflik dan kekerasan komunal di tengah masyarakat saat ini.
5. Potensi Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi, serta munculnya ekses ekses negatif dengan munculnya modus modus kejahatan yang baru dengan memanfaatkan tekhnologi canggih dan maraknya kasus kerusakan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional.

Oleh karena itu, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan peningkatan kualitas pembinaan kesatuan bangsa dan pengurangan potensi konflik sosial sebagai tujuan dan sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika ada) serta SK Tim Penyusunan LKIP.

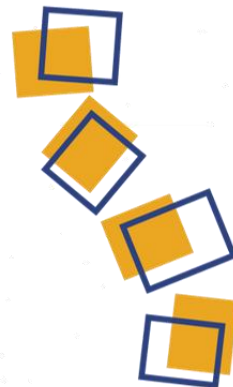


02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Lihat Dokumen Renstra Bab IV

Tujuan
Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.
Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial

Indikator
Tingkat Bina Kesatuan Bangsa
Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024-2026

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	100	80	82,50	92
2	Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial.	Persen	100	100	100	21	66	92

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan sesudah perubahan:

No	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	100	80	82,50	92
2	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	21	66	92

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	(%)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 141.230.000	2.71 %
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	RP. 3.122.247.535	37.85%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 854.985.000	10.37%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.288.485.000	3.50 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	107.125.000	1.30 %
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.733.868.251	45.27 %
Jumlah	Rp. 8.247.940.786	100%

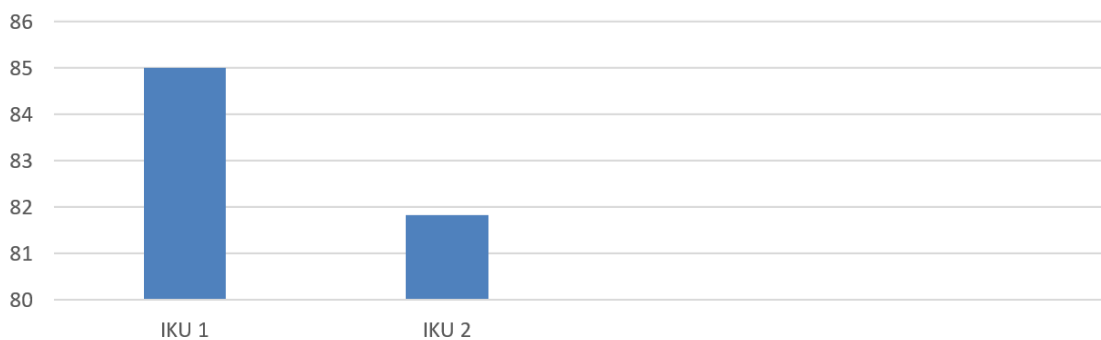
03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 85%. Sebanyak 2 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 0 Indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025. Dari 2 indikator sasaran yang ditargetkan Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 85% dan 1 indikator mencapai kinerja 81,82%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	82,50%	85%	103,03%
2	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	66%	81,82%	123,96%

IKU 1

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa

Capaian Tahun 2025

103,03%

Target

82,50 %

Realisasi

85 %

Realisasi Tahun 2024

80 %

Target Akhir RPD

97 %

Capaian Tahun 2024

80%

Realisasi
Provinsi/Pusat

Faktor yang Mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kesadaran Tentang Kebebasan, Kesetaraan dan Lembaga Demokrasi
- ❖ Meningkatnya Pengamalan Masyarakat Tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- ❖ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ❖ Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Ormas
- ❖ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Badan Kesbangpol

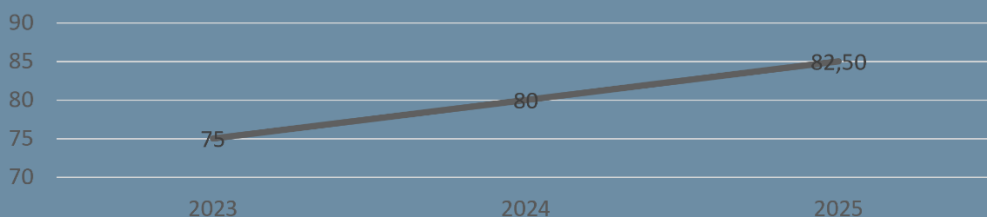
Program yang Mendukung

- ❖ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program
- ❖ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya
- ❖ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ❖ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya 82,50%.

Tren Tingkat Bina Kesatuan Bangsa



IKU 2

Persentase penurunan potensi konflik sosial

Berkurangnya Potensi Konflik Sosial

Capaian Tahun 2025

123,96%

Target

66 %

Realisasi

81.82%

Realisasi Tahun 2024

20.83 %

Target Akhir RPD

97 %

Capaian Tahun 2024

20.81%

Realisasi
Provinsi/Pusat

Faktor yang Mempengaruhi

- ◆ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kewaspadaan Daerah

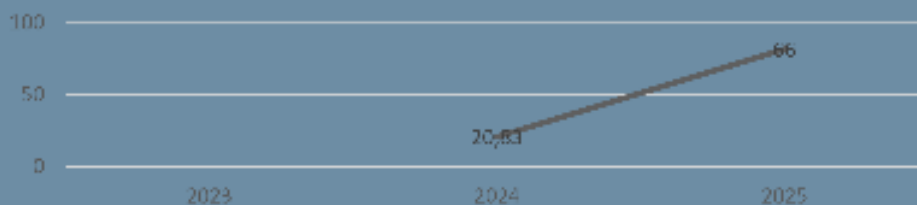
Program yang Mendukung

- ◆ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Efisiensi

Efisiensi atas capaian Saasaran Strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya 66 %.

Tren Persentase penurunan potensi konflik sosial



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa

Untuk menjawab isu strategis tingkat bina kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa, maka ditetapkan sasaran strategis meningkatnya kualitas pembinaan kesatuan bangsa. Kualitas pembinaan kesatuan bangsa merupakan upaya dan tahapan dalam membangun dan memperkuat persatuan serta kesatuan dalam suatu bangsa.

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa merujuk pada upaya dan tahapan dalam membangun dan memperkuat persatuan serta kesatuan dalam suatu bangsa. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk:

1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
 - a. Pembinaan ideologi Pancasila.
 - b. Peningkatan wawasan kebangsaan.
 - c. Penanaman nilai-nilai karakter bangsa.
2. Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional:
 - a. Penyelenggaraan politik dalam negeri yang sehat.
 - b. Peningkatan ketahanan nasional.
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan.
3. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.
 - b. Peningkatan kewaspadaan nasional.
4. Organisasi Kemasyarakatan:
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
 - b. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya tersebut umumnya dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di tingkat daerah. Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam:

- * Merumuskan kebijakan teknis.
- * Melaksanakan pembinaan.
- * Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dengan demikian, Tingkat Bina Kesatuan Bangsa mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa.

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dapat dihitung dengan rumus Jumlah orang yang melaksanakan hasil pembinaan dibagi jumlah orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa dikali seratus persen, maka Jumlah orang yang melaksanakan hasil pembinaan sebanyak 870 Orang, jumlah orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa sebanyak 1.082 Orang pada tahun 2025 maka jumlah Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 85,00%. Dapat dilihat dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Orang yang melaksanakan hasil Bina Kesatuan Bangsa}}{\text{Jumlah Orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa}} \times 100$$

$$\frac{920}{1082} = 0,85 \times 100 = 85,00$$

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	82,50%	85%	103,03%

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa merupakan data hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Sasaran Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dan realisasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar 85%, semakin banyaknya orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan maka semakin bagus persentasenya.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	80 %	85 %	5 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	103,03 %	3,03 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada tahun 2025 mengalami Kenaikan dibanding dengan nilai capaian tahun 2024. Terlepas dari hal tersebut diatas, pada prinsipnya upaya optimalisasi kinerja karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan, terbukti dengan adanya 103,03% capaian kinerja tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2024). orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan lebih besar tahun 2025 dari tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	85 %	85 %	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada target akhir Renstra 2025-2030 capaian kinerja Tingkat Bina Kesatuan Bangsa di Kabupaten Majalengka 103,03% dari target kinerja 82,50% dikarenakan orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan lebih besar tahun 2025 dari tahun 2024.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	85 %		

Berdasarkan tabel Indikator diatas tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi karena indikator yang digunakan berbeda.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

- 1) Meningkatnya Kesadaran tentang Kebebasan, Kesetaraan dan Lembaga Demokrasi Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik,



kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara konvensional kegiatan ini mencakup

tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan

pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Untuk mengupayakan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Membina Masyarakat dalam pendidikan politik



Kegiatan ini diberikan kepada Organisasi Perempuan di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2025 pembinaan ini telah

dilaksanakan bertempat di Aula Nyi Rambut Kasih Majalengka. Pendidikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mengundang Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dari Akademisi. Pembinaan pendidikan politik ini penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam pemilihan umum.

b. Menyalurkan bantuan keuangan hibah tahunan

Setiap tahunnya Pemkab Majalengka menyalurkan bantuan dana hibah bagi sejumlah partai politik (Parpol) yang memiliki kursi sebagai wakil rakyat untuk kepentingan partai, dana hibah tersebut ditujukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bantuan dana hibah kepada parpol tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dana hibah itu terdapat tiga bagian fungsinya, untuk pendidikan politik, kesekretariatan dan operasional. Namun, Parpol harus menggunakan 60 persen dari dana tersebut untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pemberian dana tersebut, berdasarkan PP No.5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sesuai PP tersebut Pemkab Majalengka memberikan bantuan kepada parpol yang memiliki wakil di DPRD Majalengka berupa dana hibah dari APBD daerah. Jumlah bantuan kepada setiap parpol berbeda-beda, ditentukan berdasarkan suara yang diperoleh partai

politik itu sendiri pada saat pemilu tahun 2024 lalu. Setidaknya ada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Majalengka periode 2024-2029, PDIP 15 kursi, Gerindra 5 kursi, Golkar 7 kursi, PKS 7 kursi,



PKB 6 kursi dan PAN 5 Kursi. Selanjutnya, PPP 4 kursi, Demokrat 1 kursi. Parpol tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp 3.000 untuk satu suara yang diperoleh pada pemilu, Terdapat 735.456 suara yang diperoleh oleh 8

parpol tersebut, dan total dana bantuan yang akan diberikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.677.280.000, Bertempat di Gedung Abdi Negara Majalengka.

2) Meningkatkan Pengamalan Masyarakat tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Negara Indonesia adalah negara bangsa yang dibangun atas dasar keanekaragaman suku-suku bangsa. Dalam kondisi Keanekaragaman suku bangsa, bangsa Indonesia telah bertekad untuk hidup dalam tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia, dengan dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika. Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh.

Maka dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan:

a. Membina generasi muda dalam penguatan karakter kepemimpinan berwawasan bela negara

Pada Tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan *Goes to School* untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dan memahami empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Pada Tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan di di SMAN 1 Leuwimunding, SMAN 1 Ligung, MAN 1 Majalengka.



Pada tanggal 19 Desember 2025 diperingati sebagai Hari Bela Negara ke-77. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara setiap 19 Desember, masyarakat dapat mengikuti pedoman pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara (PKBN). Implementasi kesadaran bela negara tersebut dapat dilakukan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Berikut ini nilai dasar atau unsur dasar pelaksanaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, yaitu: Cinta tanah air, Sadar berbangsa dan bernegara, Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa dan negara, Memiliki kemampuan awal bela negara bertempat di Halaman Pendopo Kabupaten Majalengka.



Telah dilaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah

satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Maka dalam Hal ini Bakesbangpol Majalengka Secara Rutin Melaksanakan Hari Lahir Pancasila Pada Setiap Tanggal 1 Juni Bertempat di Pendopo Majalengka.

- b. Membina pemuda kader Kabupaten yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera



Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya

mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Wali Kota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Merdeka). Anggotanya berasal dari pelajar SMA Sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus. Di Kabupaten Majalengka Sendiri terdiri dari 32 Pasukan Paskibraka 45 Pasukan TNI/Polri, Bertempat di GGM Majalengka.

3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.



Pada Tahun 2025 Bakesbangpol Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan masyarakat dan anggota FKUB dalam pemahaman kearifan lokal, penguatan

peran FKUB dan diseminasi kerawanan ketahanan yang dihadiri oleh Tim Penganut Aliran Kepercayaan (Pakem) yang terdiri dari Anggota TNI, Polri, Kejasaaan, Tokoh Agama dan Kepala Daerah (Bupati). Dalam Setiap Triwulan atau 3 Bulan Sekali Melakukan Rapat Hasil Pemantauan dilapangan Bertempat di Aula Kejaksaan Kabupaten Majalengka.

4) Meningkatkan Kemandirian dan Keberdayaan Ormas



Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 240 Ormas. Maka dari itu kami melakukan pembinaan ke setiap Sekretariat Ormas sekaligus mensosialisasikan

Peraturan Ormas, selain itu Bakesbangpol Kabupaten Majalengka juga mengadakan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Setiap ormas mengirimkan ketua, sekretaris dan bendahara mengikuti kegiatan pemberdayaan ormas yang diadakan di Obyek Wisata Talaga Pancar Kabupaten Majalengka.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bidang Kesatuan Bangsa	Rp854.585.000
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Bidang Kesatuan Bangsa	Rp.107.125.000
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Poldagri dan Ormas	Rp. 169.000.000
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	Bidang Poldagri dan Ormas	RP. 3.122.247.535
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	Rp. 3.733.868.251

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa yaitu 1,4% atau sebesar Rp. 115.190.999,00 dari pagu anggaran Rp. 8.247.940.786,00 dengan realisasi Rp. 8.132.749,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa karena semakin banyaknya orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan maka semakin bagus persentasenya.

INDIKATOR 2

Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial

Untuk menjawab isu strategis persentase penurunan potensi konflik sosial dan mewujudkan tujuan penurunan potensi konflik sosial, maka ditetapkan sasaran strategis berkurangnya potensi konflik sosial. Berkurangnya potensi konflik sosial merupakan upaya dan tahapan dalam membangun dan memperkuat persatuan serta kesatuan dalam suatu bangsa.

Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial yang meliputi Pemetaan konflik social di Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bersama Mitra Kepolisian Resort Majalengka, Komandan Distrik 0617 Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, Yonif Raider Galuh Taruna 321, Danlanud S Sukani, Subdenpom Majalengka, Kodam III Siliwangi, Densus 88 Anti Teros, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis dan Organisasi Pergagkat Daerah Terkait. Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk Penyelenggaraan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah melalui Badan Kesbangpol melakukan berbagai upaya untuk menurunkan potensi konflik sosial, antara lain:

- a. Pemetaan potensi konflik di berbagai daerah.

- b. Peningkatan kewaspadaan dini dan deteksi dini potensi konflik.
- c. Mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik.
- d. Peningkatan dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat.
- e. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.

Selain itu, peran aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial.

Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dapat dihitung dengan rumus Jumlah Konflik Tahun kemarin dikurangi Jumlah Konflik Tahun Sekarang dibagi Jumlah Konflik Tahun Sekarang dikali seratus persen, maka konflik tahun 2024 sebanyak 120 konflik dan jumlah konflik pada tahun 2025 sebanyak 66 konflik social maka jumlah persentase indicator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial 81,82 %. Dapat dilihat dibawah ini:

$\frac{\text{Jumlah Konflik Tahun kemarin (2024) - Jumlah Konflik Tahun Berjalan (2025)}}{\text{Jumlah Konflik Tahun Berjalan (2025)}} \times 100$						
2025	120	-	66	=	$\frac{54}{66}$	$= 0,8182 \times 100 = 81,82$



1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	66%	81,82%	123,96%

Persentase penurunan potensi konflik sosial merupakan data hasil deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Sasaran Berkurangnya Potensi Konflik Sosial dengan Indikator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar 81,82%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20.85%	85%	64.15 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025	Peningkatan/ Penurunan Realisasi
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20.85%	123,96%	103,11 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada tahun 2025 mengalami Peningkatan dibanding dengan nilai capaian tahun 2024. Terlepas dari hal

tersebut diatas, pada prinsipnya upaya optimalisasi kinerja karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan, terbukti dengan adanya 103,11% capaian kinerja tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2025).

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	81,82 %	81,82 %	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial pada target akhir Renstra 2024-2026 relatif jauh dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditetapkan, salah satu penyebab hal tersebut adalah dalam pengumpulan data pendukung dilaksanakan bulan September setiap tahunnya, sehingga data-data yang bersifat pendukung dari bulan Oktober s.d Desember setiap tahunnya tidak terhitung. Untuk mengatasi masalah tersebut kami berupaya semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, terbukti pada tahun 2025 capaian kinerja Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Majalengka 103,11% dari tahun sebelumnya (tahun 2024)

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	81,82%		

Berdasarkan tabel Indikator diatas tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi karena indikator yang digunakan berbeda.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Kewaspadaan Daerah

Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya



membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah secara cepat. Hal ini dapat membantu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan masalah sosial yang mungkin muncul di masyarakat. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan terhadap

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebuah forum yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman masyarakat atau ancaman lainnya, serta mengevaluasi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pembentukan FKDM sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan ancaman keamanan di wilayahnya.

Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan FKDM di Kabupaten Majalengka, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya FKDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi anggota FKDM, serta membentuk program *reward* bagi anggota FKDM yang aktif dan berprestasi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memfasilitasi akses dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh FKDM, seperti peralatan, transportasi, dan anggaran. FKDM di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk sampai tingkat Kecamatan 8 orang FKDM Kabupaten dan 3 orang FKDM setiap kecamatan.

Tim Kewaspadaan Dini bertugas merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini

Pemerintah Daerah di daerah, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah, mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional dan memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah. Tim Wasdin Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Orang Terdiri Dari Pemda Majalengka, Polres Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Lanud S. Sukani, Kejaksaan Negeri Majalengka, Deninteldam Kodam III Siliwangi, Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kesatuan Bangsa	Rp. 288.485.000

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial pada sasaran Berkurangnya Potensi Konflik Sosial yaitu sebesar 0% atau Rp. 00,00 dari pagu anggaran Rp. 287.175.000,00 dengan realisasi Rp. 287.175.000,00.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas, Indikator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran strategis Berkurangnya Potensi Konflik Sosial karena semakin banyaknya orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan maka semakin bagus persentasenya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	103,03%	98.60%
2.	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	123,96%	100%

Berdasarkan table di atas, terdapat anggaran sebesar 1,4% atau Rp. 115.190.999,00 yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut merupakan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak terserap karena adanya pemotongan Tunjangan Kinerja.



04

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2025 yaitu sebesar 83,41% dengan sebanyak 2 sasaran tercapai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Rata-rata efisiensi anggaran untuk seluruh sasaran yaitu sebesar 1,4% atau Rp 115.190.999,00.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI

Pihak Pertama,



Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660822 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %
2	Berkurangnya Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	100 %

Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.616.516.582,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 994.145.000,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 2.358.968.000,00
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 169.000.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 125.000.000,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 310.035.000,00

Majalengka, 31 Januari 2025

Pj. Bupati Majalengka


H. DEDI SUPANDI.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik




H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660822 198903 1 005

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025
Pihak Pertama,

Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660822 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	82.5 %
2.	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial	66 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.733.868.251,00	APBD
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 854.985.000,00	APBD
3.	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 3.122.247.535,00	APBD
4.	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp 141.230.000,00	APBD
5.	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 107.125.000,00	APBD
6.	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 288.485.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 8.247.940.786,00	



Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Dr. H. HERY RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.
19660822 198903 1 005

Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan



Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup PD



BAKESBANGPOL

Father, Kesbang, Kesbang, Kesbang, kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kesbang, Kes...



LKIP BAKESBANGPOL TAHUN 2025 6 JANUARI 2025.doc



Pratinjau tidak tersedia

14 MB - DOC

LKIP 2025



SK Tim LKIP

SK TIM PENYUSUN LKIP

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Gerakan Koperasi No. 13 Majalengka 45414

2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Gerakan Koperasi No. 13 Telp./Fax. (0233) 282511
Majalengka 45414

K E P U T U S A N KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 000.7.5/10.1/Bakesbangpoll-Sekret.

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660822 198903 1 005

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.7.5/10.1/Bakesbangpol-Sekret.
Tanggal : 6 Januari 2025
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengarah Ketua Tim : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
: Jabatan Fungsional Perencana pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggota : 1. Jabatan Fungsional Administrator Data Base (ADB) pada Bidang Kesatuan Bangsa;
2. Jabatan Fungsional Administrator Data Base (ADB) pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660822 198903 1 005

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.7.5/10.1/Bakesbangpol-Sekret.
Tanggal : 6 Januari 2025
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Tahun 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

I. Penanggung Jawab dan Pengarah

1. Memberikan intruksi dan arahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

II. Ketua

1. Menyusun jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan Penyusunan Draf Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
3. Membuat bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

III. Anggota

1. Menyiapkan format-format pengumpulan bahan dan data untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
3. Menyusun Bahan dan Data menjadi Draf Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Majalengka



Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660822 198903 1 005